https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

DARI RIWĀYAH KE DIRĀYAH: HISTORIOGRAFI TADWĪN HADIS ERA MUTAAKHKHIRĪN

Risvan Rinaldi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
risvanrinaldi@gmail.com

Zulkifli Wagola
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
wagolazw@gmail.com

Article History:

Received: 14 Augustus 2026;
Accepted: 12 September 2026;
Published: 06 November 2026.

Abstract. *This study highlights the dynamics of hadith codification (tadwīn) in the mutaʾakhkhirīn era, a period that has received relatively little attention in the historiography of hadith. It aims to identify methodological discontinuities, socio-political influences, and the mechanisms of textual authority construction in post-canonical hadith literature. Employing a critical historiographical approach to primary sources from the 6th to 9th centuries AH, the research reveals that the shift from oral transmission to analytical engagement represents a deliberate epistemological adaptation rather than decline. The influence of madrasas, legal school affiliations, and ruling patronage shaped the orientation of scholarly works, yet did not reduce them to mere political instruments. Furthermore, mutaʾakhkhirīn scholars established a coherent ecology of authority through ijāzah (license), takhrīj (source verification), and sharḥ (commentary). This system structurally differs from that of the mutaqaddimīn, yet effectively sustained the scholarly legitimacy of hadith across generations.*

Keywords:

Authority; Hadith Codification; Islamic Historiography; Mutaʾakhkhirīn

Abstrak. Penelitian ini menyoroti dinamika tadwīn hadis pada era mutaakhkhirīn, periode yang selama ini kurang mendapat tempat dalam wacana historiografi hadis. Tujuannya adalah mengidentifikasi diskontinuitas metodologis, pengaruh sosio-politik, dan mekanisme konstruksi otoritas teks dalam literatur hadis pasca kanonisasi. Dengan pendekatan historis-kritis terhadap sumber primer abad VI–IX Hijriah, studi ini menemukan bahwa pergeseran dari transmisi ke analisis teks merupakan adaptasi epistemologis yang disengaja, bukan kemerosotan. Pengaruh madrasah, afiliasi mazhab, dan patronase penguasa turut membentuk orientasi karya, tetapi tidak mereduksinya menjadi sekadar alat politik. Lebih lanjut, ulama mutaakhkhirīn membangun ekologi otoritas yang koheren melalui ijāzah, takhrīj, dan syarḥ. Sistem ini berbeda secara struktural dari era mutaqaddimīn, namun efektif mempertahankan legitimasi keilmuan hadis lintas generasi

A. LATAR BELAKANG

Naskah Pandangan umum yang menempatkan era mutaakhkhirīn sebagai periode stagnasi metodologis dan repetisi tanpa inovasi ternyata

mengabaikan geliat intelektual yang justru menentukan bentuk final tradisi hadis yang bertahan hingga hari ini. Ibn al-Ṣalāḥ, misalnya, menyusun Muqaddimah yang tidak hanya merangkum karya mutaqaddimīn, tetapi juga memperkenalkan pembakuan klasifikasi hadis ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍaʿīf ke dalam satu sistem terpadu, sesuatu yang tidak ditemukan secara eksplisit pada kitab-kitab sebelumnya.(Dickinson, 2002) Al-Suyūṭī, yang hidup di ujung era mutaakhkhirīn, menulis Tadrīb al-Rāwī sebagai syarah atas Taqrīb al-Nawawī, tetapi dalam prosesnya ia memperkenalkan lapisan analisis baru yang memperlihatkan pergeseran orientasi keilmuan dari kritik otentisitas ke pemeliharaan dan sistematisasi korpus.(bin Kurdian, 2015) Karya-karya seperti Fatḥ al-Bārī dan ‘Umdat al-Qārī tidak sekadar mengulangi teks al-Bukhārī, melainkan membangun perangkat hermeneutis yang menghubungkan teks kanonik dengan realitas sosial dan mazhab yang telah mapan.(Hudaya, 2018) Dengan demikian, era ini justru menyaksikan transformasi mendalam dari tadwīn sebagai aksi kodifikasi menjadi tadwīn sebagai tradisi kritik terapan yang melembaga.

Penelitian tentang dinamika internal tadwīn era mutaakhkhirīn luput dari perhatian para sarjana. Setidaknya terdapat tiga kecenderungan besar dalam studi hadis yang menempatkan era ini. Pertama, kajian yang berfokus pada kodifikasi awal dan proses transmisi lisan ke tulisan pada abad I–III H, yang umumnya menempatkan era setelahnya sebagai catatan penutup yang tidak lagi problematis. Kedua, studi tentang kanonisasi kitab-kitab induk, khususnya Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Muslim, yang meskipun menelusuri penerimaan dan otoritas teks hingga abad V H, tetap membatasi diri pada narasi penerimaan, bukan pada dinamika produksi pengetahuan baru oleh ulama mutaakhkhirīn. Ketiga, kajian yang menyinggung era mutaakhkhirīn hanya sebagai konteks bagi tema lain, misalnya perkembangan mazhab, institusi madrasah, atau pemikiran Islam secara umum, tanpa pernah menjadikan tadwīn sebagai objek analisis yang mandiri. Akibatnya, kesan bahwa era mutaakhkhirīn hanyalah fase preservasi pasif terus bertahan. Dengan demikian, penelitian yang secara spesifik menyorot dialektika antara

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

kontinuitas dan diskontinuitas dalam tadwīn era mutaakhkhirīn menemukan signifikansinya sekaligus distingsi untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini bertujuan untuk mengungkap dinamika internal tadwīn hadis era mutaakhkhirīn dengan menelusuri interaksi antara warisan metodologis mutaqaddimīn dan tekanan institusional baru yang membentuknya. Seiring dengan tujuan tersebut, penulis mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana karakteristik pergeseran metodologis yang terjadi dalam tadwīn era mutaakhkhirīn jika dibandingkan dengan fondasi yang diletakkan generasi mutaqaddimīn? Kedua, bagaimana faktor sosio-politik dan institusional memengaruhi arah kodifikasi ulang serta konstruksi otoritas teks pada periode tersebut? Pertanyaan pertama bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik diskontinuitas yang membedakan pendekatan mutaakhkhirīn dari pendahulunya, khususnya dalam hal klasifikasi hadis, perluasan kritik matn, dan pergeseran fokus dari verifikasi ke aplikasi. Pertanyaan kedua bertujuan untuk melacak bagaimana variabel eksternal, seperti patronase penguasa, peran institusi Dār al-Ḥadīth, dan kebutuhan mazhab, mencoraki produk tadwīn yang dihasilkan.

Penelitian ini berangkat dari tiga argumentasi. Pertama, bahwa kemapanan korpus kanonik tidak menghentikan kreativitas metodologis, melainkan mengalihkannya ke ranah baru: sistematisasi, pen-takhrīj-an, dan kodifikasi literatur pendukung yang berfungsi memperkuat bangunan epistemik ʿulūm al-ḥadīth. Kedua, institusionalisasi pengajaran hadis melalui madrasah dan Dār al-Ḥadīth menciptakan mekanisme transmisi yang lebih terstruktur, tetapi sekaligus menuntut standarisasi teks rujukan yang secara bertahap mengunci hierarki kitab dan mempersempit ruang kritik independen. Ketiga, hubungan antara ulama dan otoritas politik pada era ini, mendorong produksi karya-karya besar. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa tadwīn era mutaakhkhirīn harus dipahami bukan sebagai epilog, melainkan sebagai episode pembentukan yang memiliki logika dan dinamikanya sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan historis-deskriptif dengan metode historiografi kritis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab tiga problem akademik yang diajukan secara terpadu.(Ayushi Ranjan & Himalaya Singh, 2025) Untuk mengurai problem diskontinuitas metodologis, pendekatan historis-deskriptif berfungsi menelusuri pergeseran kaidah dan klasifikasi antara era mutaqaddimīn dan mutaakhkhirīn melalui pembacaan ketat terhadap teks-teks muṣṭalaḥ. Dalam menganalisis problem pengaruh sosio-politik, metode historiografi kritis memungkinkan pelacakan interaksi antara produksi teks tadwīn dengan konteks kekuasaan, patronase, dan institusi keilmuan yang melingkupinya. Adapun untuk membedah konstruksi otoritas teks, kerangka metodologis ini mengadopsi model historiografi kanonisasi dan prinsip analisis sumber yang menempatkan teks hadis sebagai data sejarah yang dapat diuji menggunakan perangkat kritik sumber.(Begg, 2012)

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori. Kategori pertama adalah sumber primer berupa kitab-kitab muṣṭalaḥ, syarah, dan takhrīj yang ditulis oleh para ulama mutaakhkhirīn, khususnya yang hidup pada rentang abad VI hingga IX Hijriah. Kitab-kitab ini merepresentasikan produk tadwīn era mutaakhkhirīn secara langsung, baik dalam dimensi sistematisasi metodologi, perluasan kritik, maupun aplikasi kritik hadis terhadap korpus kanonik. Kategori kedua adalah sumber sekunder berupa monograf dan artikel akademisi kontemporer, baik dari tradisi kritis orientalis maupun dari sarjana revisionis yang berfungsi sebagai kerangka teoretis sekaligus mitra dialog kritis dalam analisis. Kedua kategori sumber ini digunakan secara dialektis: sumber primer menjadi basis rekonstruksi historis, sementara sumber sekunder menyediakan pisau analisis dan data kontekstual yang memperkaya penafsiran terhadap dinamika internal tadwīn era mutaakhkhir.

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskontinuitas Metodologi Tadwīn antara Mutaqaddimīn dan Mutaakhkhirīn

Fondasi verifikasi hadis pada era mutaqaddimīn bertumpu pada tiga pilar utama yaitu liqā' (pertemuan langsung antara guru dan murid), ittiṣāl al-sanad (ketersambungan rantai periwayat), dan naqd al-rijāl (kritik terhadap para perawi).(Kamaluddin, 2023) Ketiganya membentuk satu kesatuan metodologis yang menjamin integritas transmisi hadis dari generasi ke generasi. Al-Bukhārī, dalam muqaddimah Ṣaḥīḥ-nya, menetapkan syarat ketat berupa keharusan adanya pertemuan langsung (al-liqā') antara periwayat dan gurunya sebagai prasyarat ketersambungan sanad; tanpa bukti pertemuan itu, sanad dianggap terputus dan hadisnya tidak memenuhi kriteria kesahihan.(Mohammed Mubarak Mutahhar, 2023)

Senada dengan itu, Muslim ibn al-Ḥajjāj dalam muqaddimah Ṣaḥīḥ-nya menekankan klasifikasi perawi ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat keakuratan dan kejujuran mereka, serta menegaskan bahwa hanya riwayat dari perawi tingkat pertama dan kedua yang dapat diterima sebagai hujah. Standar ini memperlihatkan kesadaran tinggi bahwa integritas transmisi bergantung sepenuhnya pada kualitas personal perawi dan kepastian adanya kontak langsung dalam rantai sanad. Dengan kata lain, validitas sebuah hadis pada era mutaqaddimīn diukur terutama dari kekuatan mata rantai transmisi oral, bukan dari analisis isi teks secara mandiri. Dickinson menunjukkan bahwa kritik hadis Sunni awal didasarkan pada paradigma testimonial, di mana sanad berfungsi sebagai dokumen hukum yang harus diuji melalui perangkat al-jarḥ wa al-ta'dīl secara ketat.

Titik balik paling mencolok yang menandai diskontinuitas antara era mutaqaddimīn dan mutaakhkhirīn ditemukan dalam pengakuan eksplisit Ibn al-Ṣalāḥ mengenai krisis sanad ʿālī. Dalam bab Maʿrifat al-Isnād al-ʿĀlī wa al-Nāzil, Ibn al-Ṣalāḥ merinci lima tingkatan ketinggian sanad (ʿulūw), dan menempatkan "kedekatan dengan Rasulullah" sebagai tingkatan

pertama dan tertinggi. Namun, ia segera menyadari bahwa pada zamannya, memperoleh sanad jenis ini hampir mustahil karena jarak waktu yang semakin jauh dari masa kenabian dan berkurangnya jumlah periwayat yang memenuhi standar ketat era sebelumnya.

Pengakuan ini memiliki bobot historiografis yang luar biasa karena berasal dari otoritas tertinggi dalam disiplin ʿulūm al-ḥadīth era mutaakhkhirīn. Ibn al-Ṣalāḥ bukan sekadar mencatat kenyataan historis, melainkan secara implisit mengakui bahwa infrastruktur transmisi yang dibangun mutaqaddimīn tidak lagi tersedia sepenuhnya. Jonathan Brown mencatat bahwa pasca-kanonisasi, para ulama hadis menghadapi dilema mendasar: semakin langkanya sanad ʿālī menuntut pergeseran orientasi dari verifikasi transmisi ke pemeliharaan dan penerapan warisan yang telah terkodifikasi. Dengan kata lain, krisis ini bukanlah akhir dari tradisi kritik hadis, melainkan awal dari redefinisi fungsi kritik itu sendiri.

Menghadapi realitas tersebut, generasi mutaakhkhirīn merespons dengan menggeser metode riwāyah (transmisi) ke dirāyah (penguasaan analitis). Al-Nawawī, melalui al-Taqrīb wa al-Taysīr, melakukan sistematisasi kategori hadis yang lebih terstruktur dibandingkan karya-karya sebelumnya. Ia tidak sekadar mengulangi klasifikasi mutaqaddimīn, melainkan menyederhanakan dan menyusunnya ke dalam kerangka pedagogis yang memudahkan pembelajaran dan penerapan.(Nabil Amir, 2023)

Puncak adaptasi ini tampak dalam karya al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī. Dalam pembahasan tentang hadis ḥasan, al-Suyūṭī menunjukkan kompleksitas perdebatan definisi di kalangan ulama. Ia mengutip Ibn al-Ṣalāḥ yang membagi hadis ḥasan menjadi dua kategori: ḥasan li-dhātihī dan ḥasan li-ghayrihī (hasan karena dukungan riwayat lain).(Jalāl al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr, T.t., hlm. h 60) Al-Suyūṭī kemudian mengembangkan lebih jauh dengan menunjukkan bahwa hadis ḥasan li-ghayrihī pada hakikatnya adalah hadis ḍaʿīf yang terangkat derajatnya karena adanya mutāba ʿāt atau shawāhid. Perluasan konsep ini menunjukan

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

bahwa pergeseran mutaqaddimīn cenderung menolak hadis yang sanadnya lemah, mutaakhkhirīn membuka ruang penerimaan bersyarat melalui mekanisme iʿtiḍād (penguatan) berbasis analisis komparatif antarteks.

Adaptasi ini juga terlihat dalam pergeseran definisi ʿulūw itu sendiri. Ibn al-Ṣalāḥ mencatat bahwa para ulama mutaakhkhirīn mulai mengakui bentuk ʿulūw baru yakni kedekatan sanad kepada kitab-kitab kanonik seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Muslim, bukan hanya kedekatan kepada Nabi.(Abū ʻAmr ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, 2004, hlm. h 259–262) Ini adalah pengakuan bahwa otoritas telah bergeser dari transmisi personal ke teks yang telah disepakati, dan bahwa validitas sebuah riwayat kini diukur, sekurang-kurangnya sebagian, dari kedekatannya dengan korpus kanonik. Daniel Brown kemudian menegaskan bahwa pergeseran semacam ini menandai transformasi fundamental dalam konsep otoritas Islam dengan kata lain, suatu otoritas yang bertumpu pada mata rantai personal menuju otoritas yang bertumpu pada teks yang diwarisi dan disepakati komunitas.

Dengan demikian, diskontinuitas metodologis antara mutaqaddimīn dan mutaakhkhirīn bukanlah sebuah penyimpangan dari standar, melainkan respons adaptif terhadap realitas historis yang tak terelakkan. Fondasi riwāyah yang dibangun mutaqaddimīn tidak ditinggalkan, melainkan ditransformasikan ke dalam bangunan dirāyah yang lebih kompleks dan aplikatif.

2. Pengaruh Konteks Sosio-Politik terhadap Tadwīn Hadis Mutaakhkhirīn

Institusi madrasah yang berkembang pesat sejak abad V H menjadi lokus utama produksi dan reproduksi keilmuan hadis era mutaakhkhirīn. Berbeda dengan halaqah era sebelumnya yang lebih cair dan personal, madrasah menawarkan struktur formal dengan kurikulum baku yang terikat pada afiliasi mazhab tertentu.(Hasaruddin, 2011) George Makdisi menunjukkan bahwa madrasah berfungsi ganda: sebagai lembaga

pendidikan hukum Islam dan sebagai arena pembentukan jaringan kesarjanaan yang terkonsolidasi. Dalam konteks inilah, kitab-kitab tadwīn tidak lagi disusun sebagai proyek universal yang melayani seluruh umat tanpa sekat, melainkan kerap menjawab kebutuhan internal mazhab.Contoh paling representatif dari fenomena ini adalah Naṣb al-Rāyah karya al-Zaylaʿī.

Kitab ini disusun untuk mentakhrij hadis-hadis yang digunakan oleh al-Marghīnānī dalam al-Hidāyah, sebuah kitab fikih mazhab Ḥanafī yang menjadi rujukan otoritatif di kalangan pengikut mazhab tersebut. Meskipun al-Zaylaʿī sendiri adalah seorang muḥaddith yang mumpuni, proyek tadwīn yang ia jalankan tidak bertolak dari ambisi menyusun korpus hadis universal, melainkan dari kebutuhan spesifik memverifikasi landasan hadis yang dipakai oleh mazhab Ḥanafī dalam argumen fikihnya. Dengan demikian, orientasi tadwīn bergeser dari kodifikasi sumber primer menuju pengabdian kepada tradisi keilmuan yang telah terkotak-kotakkan dalam mazhab.

Fenomena ini tidak terbatas pada al-Zaylaʿī. Brown mencatat bahwa di era mutaakhkhirīn, literatur takhrīj dan syarah hadis kerap diproduksi dalam kerangka afiliasi mazhab tertentu, di mana seorang muḥaddith sekaligus berperan sebagai pembela mazhabnya melalui analisis dan penyajian hadis yang selektif. Pergeseran orientasi ini menandai transformasi tadwīn dari aktivitas yang didorong oleh kekhawatiran akan hilangnya sunnah, sebagaimana era mutaqaddimīn, menjadi aktivitas yang juga didorong oleh kebutuhan mempertahankan koherens internal mazhab.

Faktor patronase penguasa memainkan peran signifikan dalam membentuk arah dan skala tadwīn era mutaakhkhirīn. Contoh paling mencolok adalah hubungan antara jabatan politik dan produksi karya hadis yang terjalin dalam karier Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī. Sebagai qāḍī al-quḍāt mazhab Syāfiʿī di Mesir di bawah Kesultanan Mamluk, Ibn Ḥajar menduduki posisi yang memberinya akses terhadap sumber daya material, jaringan keilmuan, dan legitimasi sosial yang luar biasa.(Blecher, 2013) Posisi ini

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

memungkinkannya mengerahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk menyusun Fatḥ al-Bārī, syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī yang paling monumental hingga kini.

Murid Ibn Ḥajar, al-Sakhāwī, dalam biografi gurunya al-Jawāhir wa al-Durar, merekam dengan rinci bagaimana jaringan patron dan kolega melingkupi proses penyusunan Fatḥ al-Bārī.(Blecher, 2013) Misbah, dalam studinya tentang komentar hadis di era Mamluk, menegaskan bahwa komposisi Fatḥ al-Bārī bukanlah aktivitas isolatif di ruang tulis pribadi, melainkan pertunjukan serial yang berlangsung di hadapan murid, patron, dan rival, yang terkadang berlangsung selama puluhan tahun.(Misbah, 2020) Keterkaitan erat antara posisi politik Ibn Ḥajar sebagai hakim tertinggi dan penerimaan karyanya oleh komunitas ilmiah menunjukkan bahwa otoritas teks pada era ini tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas argumentasi keilmuannya, melainkan juga oleh posisi sosial penulisnya.

Perspektif kritis terhadap fenomena ini dapat dilihat dari kerangka Ignaz Goldziher, yang sejak awal telah mencurigai dimensi sosial dan politik dari produksi hadis. Goldziher berargumen bahwa perkembangan literatur hadis tidak dapat dilepaskan dari konteks teologis, sosial, dan politik komunitas Muslim pada masa-masa setelah Nabi.(Nur, Husaein, Masrur, & Najib, 2025) Meskipun posisi Goldziher cenderung skeptis terhadap otentisitas hadis secara umum, pengamatannya tentang keterkaitan antara kekuasaan dan produksi teks keagamaan memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami mengapa karya seperti Fatḥ al-Bārī bisa muncul dan bertahan. Patronase bukanlah faktor yang mencemari kemurnian ilmiah, melainkan kondisi material yang memungkinkan karya besar lahir, namun sekaligus membentuk orientasi dan batas-batas diskursusnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tadwīn era mutaakhkhirīn merupakan fenomena yang sekaligus bersifat keilmuan dan sosial. Memahami tadwīn era ini menuntut penolakan terhadap dua ekstrem

yang sama-sama menyesatkan. Ekstrem pertama adalah idealisasi yang memandang tadwīn sebagai aktivitas murni ilmiah yang steril dari pengaruh sosial, politik, dan institusional. Pandangan ini mengabaikan bukti historis bahwa afiliasi mazhab dan patronase penguasa secara nyata membentuk arah, skala, dan orientasi karya-karya yang dihasilkan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang mereduksi tadwīn sekadar sebagai alat legitimasi politik atau kepentingan mazhab semata, tanpa mengakui integritas keilmuan dan ketekunan metodologis para ulama yang terlibat.

Scott Lucas, melalui studinya tentang generasi kritikus hadis abad III H, menunjukkan bahwa para muḥaddithīn, bahkan ketika bertindak dalam kerangka mazhab, tetap beroperasi dengan komitmen terhadap standar kritik hadis yang ketat. Harald Motzki, di pihak lain, mengembangkan metodologi isnād-cum-matn yang membuktikan bahwa transmisi hadis, meskipun rentan terhadap intervensi sosial, tetap memiliki inti historis yang dapat direkonstruksi secara ilmiah.(Sumbulah, Zarwaki, & Huda, 2022) Kedua sarjana ini mewakili posisi yang mengakui kompleksitas hubungan antara ideal keilmuan dan realitas sosial dalam tradisi hadis.

Oleh karenanya, tadwīn era mutaakhkhirīn sebagai praktik sosial dalam pengertian yang paling mendalam sebuah aktivitas intelektual yang dibentuk oleh konteks institusional dan relasi kuasa, namun tetap dijalankan dengan standar metodologis yang dijaga secara serius. Pergeseran orientasi dari riwāyah ke dirāyah yang telah dibahas sebelumnya, pengaruh madrasah dan mazhab, serta peran patronase penguasa, semuanya merupakan elemen yang membentuk ulang wajah tadwīn era mutaakhkhirīn menjadi sebuah fenomena yang unik dan kompleks.

3. Konstruksi Otoritas Teks dalam Kitab-Kitab Hadis Mutaakhkhirīn

Melemahnya peluang untuk mendapatkan samā' langsung dari guru yang memiliki sanad pendek memaksa para ulama mutaakhkhirīn mencari mekanisme transmisi alternatif yang tetap sah secara keilmuan. Ijāzah,

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

yaitu pemberian izin dari seorang guru kepada murid atau kolega untuk meriwayatkan teks tertentu, kemudian menjadi tulang punggung reproduksi otoritas tekstual pada periode ini. Ibn al-Ṣalāḥ mencurahkan perhatian besar terhadap persoalan ini dengan menyusun tipologi ijāzah yang sangat rinci.(Abū ʻAmr ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, 2004, hlm. 290) Ia membedakan antara ijāzah yang disertai penyerahan kitab secara langsung, ijāzah lisan tanpa penyerahan, ijāzah tertulis yang dikirim melalui surat, hingga ijāzah yang diberikan kepada seseorang yang belum lahir. Semua bentuk itu didiskusikan secara serius, lengkap dengan argumentasi pihak yang menerima dan menolaknya.

Analisis Ibn al-Ṣalāḥ adalah pengakuannya bahwa ijāzah yang paling kuat adalah yang digabungkan dengan munāwalah. Pada praktiknya, guru menyerahkan kitab kepada murid seraya berkata, "Ini riwayatku, maka riwayatkanlah dariku." Tindakan ini meniru struktur samā' meskipun tanpa pembacaan langsung. Akan tetapi, realitas sosial menuntut lebih dari itu. Banyak ulama yang menerima ijāzah tanpa pernah bertemu gurunya, hanya melalui korespondensi. Al-Nawawī, dalam kitabnya yang merangkum kaidah periwayatan, merespons realitas ini dengan menerima ijāzah sebagai jalur sah, tetapi tetap menempatkannya di bawah samā' dan qirā'ah dalam hierarki kekuatan transmisi.(Rippin, 2014)

Meluasnya penggunaan ijāzah mengandung paradoks yang sulit dihindari. Di satu sisi, ia memungkinkan seorang penuntut ilmu di Damaskus meriwayatkan kitab dari seorang guru di Bagdad tanpa harus menempuh perjalanan berbulan-bulan. Jaringan transmisi pun meluas secara eksponensial, dan teks-teks kanonik dapat direproduksi dengan kecepatan yang mustahil dicapai pada era sebelumnya. Di sisi lain, verifikasi substantif terhadap kapasitas penerima ijāzah menjadi semakin longgar. Seseorang dapat menyandang sanad hanya dengan selembar surat, tanpa sang guru pernah menguji hafalan atau pemahamannya.

Para ulama mutaakhkhirīn sadar sepenuhnya akan ketegangan ini. Mereka tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyalahgunaan, tetapi juga tidak memiliki alternatif lain yang memungkinkan tradisi sanad tetap bertahan tanpa ijāzah. Siddiqi mencatat bahwa penerimaan luas terhadap ijāzah pada era ini bukanlah cermin kemunduran, melainkan respons terhadap realitas sejarah yang telah berubah.(Zubayr Siddiqi, 1996, hlm. h 86-88) Dengan ijāzah, otoritas teks tidak lagi bertumpu pada kekuatan memorisasi dan interaksi personal, melainkan pada legitimasi formal yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas sebelumnya. Transmisi telah berubah dari praktik lisan yang menekankan kehadiran fisik menjadi praktik administratif yang menekankan dokumentasi.

Jika ijāzah menjaga kelangsungan transmisi untuk teks-teks yang akan datang, maka takhrīj bekerja ke arah sebaliknya yang memberikan legitimasi kepada teks-teks yang telah beredar di masa lalu. Takhrīj, secara sederhana, adalah aktivitas melacak sanad hadis-hadis yang muncul dalam kitab-kitab non-hadis, mengeluarkannya dari sumber-sumber asli, dan menilai derajatnya. Namun, di balik kesederhanaan definisi ini, takhrīj menyimpan fungsi sosial yang sangat signifikan.

Kasus yang paling jelas adalah keputusan al-'Irāqī untuk mentakhrīj hadis-hadis yang termuat dalam karya monumental al-Ghazālī. Selama berabad-abad, kitab itu telah menjadi pegangan utama dalam tradisi tasawuf Sunni, dibaca di pesantren dan surau, dan dikutip oleh para ulama dari berbagai disiplin.(Al-'Irāqī, 1982, hlm. 3–5) Namun, al-Ghazālī bukanlah seorang muḥaddith profesional. Banyak hadis yang ia kutip tidak dilengkapi sanad, sebagian bercampur dengan ucapan sufi dan hikmah, dan para pembaca tidak memiliki alat untuk memilah mana yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang bukan.

Al-'Irāqī mengambil peran sebagai jembatan antara dua dunia: dunia tasawuf yang telah menerima kitab itu sebagai rujukan, dan dunia hadis yang menuntut adanya sanad yang jelas. Ia tidak bertujuan menggugurkan otoritas al-Ghazālī, melainkan memperkuatnya dengan fondasi transmisi

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

yang kokoh.(Fadila, 2025, hlm. h 100-108) Setiap hadis ia periksa, ia lacak dalam kitab-kitab induk, ia tetapkan derajatnya sahih, hasan, atau lemah. Hasilnya adalah sebuah kitab takhrīj yang berfungsi ganda: menjadi panduan bagi pembaca yang ingin mengetahui mana hadis yang dapat dijadikan pegangan, dan sekaligus menjadi tameng bagi kitab al-Ghazālī dari kritik bahwa ia tidak bertanggung jawab secara transmisi.

Retroaktif dari takhrīj. Al-'Irāqī tidak menciptakan teks baru, melainkan memberikan otoritas terhadap teks yang telah berabad-abad beredar. Fungsi ini sangat penting secara sosial, karena ia memungkinkan tradisi keilmuan Islam yang lebih luas—fikih, tasawuf, teologi—tetap bertahan di bawah payung otoritas hadis, tanpa harus membongkar ulang seluruh bangunan keilmuan yang telah mapan. Apabila takhrīj bergerak di wilayah sanad, syarḥ beroperasi di wilayah matn, dan di sanalah konstruksi otoritas teks mencapai puncaknya. Menulis syarḥ atas kitab kanonik bukanlah sekadar aktivitas penjelasan. Ia adalah tindakan menetapkan makna, menyelesaikan kontradiksi yang tampak, dan membangun kerangka pemahaman yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī mengerjakan syarah monumentalnya terhadap Ṣaḥīḥ al-Bukhārī selama lebih dari dua puluh tahun. Selama rentang waktu itu, ia tidak hanya membaca teks Ṣaḥīḥ, tetapi juga menyerap hampir seluruh literatur syarah yang pernah ditulis sebelumnya. Dalam pengantarnya, ia menyatakan bahwa tujuannya bukan hanya menjelaskan, melainkan juga menimbang berbagai interpretasi yang ada dan memutuskan mana yang paling kuat berdasarkan kaidah-kaidah disiplin hadis.(Fadel, 1995) Pernyataan ini memperlihatkan bahwa seorang syāriḥ tidak berperan sebagai pelayan yang pasif terhadap teks, melainkan sebagai hakim yang aktif memutuskan perkara-perkara interpretatif.

Fungsi hakim ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Sejak selesai ditulis, syarah Ibn Ḥajar segera menjadi rujukan utama dalam memahami Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Pandangan-pandangan yang ia tolak perlahan

tenggelam, sementara pilihan-pilihan interpretasinya diwariskan sebagai bagian dari ortodoksi. Generasi berikutnya belajar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī melalui lensa yang telah dibentuk oleh syarah tersebut. Ini adalah kuasa interpretasi yang jauh melampaui kuasa transmisi. Al-Nawawī, dalam syarahnya terhadap Ṣaḥīḥ Muslim, menjalankan fungsi serupa.(Sevtian, 2024) Ia menyusun dua belas tujuan penulisan, mulai dari menjelaskan lafaz-lafaz yang sulit hingga menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Sekali lagi, yang terjadi bukan hanya penjelasan, melainkan konstruksi koherensi.

Lucas, melalui konsep "kritikus konstruktif", memperlihatkan bahwa para ulama hadis sejak generasi awal telah bertindak sebagai arsitek ortodoksi Sunni, bukan sekadar penjaga gudang hafalan. Syarḥ era mutaakhkhirīn adalah kelanjutan dari peran itu dalam skala yang lebih besar.(C. Lucas, 2004, hlm. h 265) Jika pada era mutaqaddimīn otoritas masih melekat pada individu perawi, pada era mutaakhkhirīn otoritas telah sepenuhnya bertumpu pada teks dan interpretasi yang dibakukan terhadapnya. Jonathan Brown menegaskan bahwa syarḥ berfungsi ganda: memelihara otoritas kitab induk yang telah menjadi kanon, sekaligus membuka ruang interpretasi yang memungkinkan teks itu tetap hidup dan relevan.

Ketiga instrumen—ijāzah, takhrīj, dan syarḥ—bekerja dalam ritme yang saling melengkapi. Ijāzah mengamankan transmisi formal dari generasi ke generasi. Takhrīj memvalidasi teks-teks yang telah beredar agar tetap berada dalam lingkup otoritas hadis. Syarḥ membangun makna dan menetapkan batas-batas interpretasi yang diterima. Melalui ketiganya, era mutaakhkhirīn tidak hanya mewarisi teks, tetapi juga membentuk cara membaca, memahami, dan mempraktikkan teks itu bagi generasi-generasi setelahnya. Otoritas yang semula bersifat personal dan bertumpu pada hafalan telah bertransformasi menjadi otoritas yang bersifat tekstual, institusional, dan terstruktur.

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

D. KESIMPULAN

Kesimpulan Narasi besar tentang sejarah hadis selama ini acap kali melompat dari era kodifikasi langsung ke era modern, meninggalkan era mutaakhkhirīn dalam senyap seolah ia hanyalah jeda panjang tanpa dinamika. Temuan penelitian ini justru menunjukkan sebaliknya: diskontinuitas metodologis yang teridentifikasi antara era mutaqaddimīn dan mutaakhkhirīn bukanlah pertanda kemerosotan, melainkan bukti adanya transformasi epistemologis yang disadari dan disistematisasi. Pengakuan dari otoritas tertinggi disiplin ini tentang kelangkaan sanad tinggi menjadi titik tolak pergeseran orientasi dari riwāyah ke dirāyah, yang kemudian direspons melalui penyederhanaan pedagogis di satu sisi dan perluasan konsep hasan li-ghayrihī di sisi lain. Keseluruhan respons ini adalah adaptasi kreatif terhadap realitas historis yang tak terelakkan, bukan sekadar pengulangan capaian sebelumnya.

Ulama mutaakhkhirīn berhasil membangun ekologi otoritas yang koheren melalui tiga instrumen yang saling memperkuat: ijāzah mengamankan legitimasi transmisi formal, takhrīj menyediakan validasi sanad secara retroaktif terhadap teks yang telah beredar luas, dan syarḥ membangun benteng interpretasi normatif terhadap korpus kanonik. Sistem ini berbeda secara struktural dari era mutaqaddimīn yang bertumpu pada transmisi personal dan verifikasi berbasis kritik perawi, namun terbukti efektif mereproduksi legitimasi keilmuan hadis lintas generasi hingga abad modern.

Keseluruhan temuan ini membawa implikasi bahwa tradisi tekstual keagamaan adalah konstruksi historis yang dinamis, bukan entitas beku yang turun dari ruang hampa sosial. Untuk memperdalam pemahaman ini, studi lanjutan direkomendasikan pada tiga jalur: studi komparatif regional guna membandingkan dinamika tadwīn di berbagai pusat keilmuan Islam; eksplorasi dimensi gender dalam jaringan ijāzah untuk merekonstruksi peran perempuan periwayat hadis dalam ekologi otoritas ini; serta penelitian tentang

dampak era mutaakhkhirīn terhadap gerakan reformasi hadis modern sebagai jembatan memahami kontestasi otoritas di masa kini.

REFERENSI

Abdurahim, M., Mujoko, B., Azzami, A., Kosasih, E., & Mighwar, M. A. (2024). Dedikasi Ulama Hadis Abad Pertama Hijriyah: Upaya Kodifikasi dan Penyebaran oleh Sahabat dan Tabi'in. *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, *2*(4), 492–504. https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i4.3277

Abū 'Amr 'Uthmān ibn 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, I. al-Ṣalāḥ. (2004). *'Ulūm al-Ḥadīth li-Ibn al-Ṣalāḥ*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.

Al-'Irāqī, Z. al-D. A. al-Faḍl. (1982). *Al-Mughnī 'an Ḥaml al-Asfār fī al-Asfār fī Takhrīj mā fī al-Iḥyā' min al-Akhbār*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ayushi Ranjan & Himalaya Singh. (2025). *Qualitative Methods of Study*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33619.23847

Begg, R. (2012). Hadith as a Means of Routinizing Charisma. *Religion & Theology*, *19*(1–2), 110–121. https://doi.org/10.1163/157430112X650311

bin Kurdian, N. K. (2015). Metode Selektif Al-Suyuti Atas Pendapat Ulama Tentang Hadis Sahih Dan Hadis Hasan Dalam Kitab Tadrib Al-Rawi. *Al-Majaalis*, *3, no. 1, Nov*. https://doi.org/doi:10.37397/almajaalis.v3i1.33.

Blecher, J. (2013). Ḥadīth Commentary in the Presence of Students, Patrons, and Rivals: Ibn Ḥajar and Ṣaḥīḥ al-Bukhārī in Mamluk Cairo. *Oriens*, *41*(3–4), 261–287. https://doi.org/10.1163/18778372-13413403

Brown, J. (2009). *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld.

Brown, J. A. (2011). The Canonization of Ibn Mâjah: Authenticity vs. Utility in the Formation of the Sunni Ḥadîth Canon. *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, *129*, 169–181. https://doi.org/10.4000/remmm.7154

C. Lucas, S. (2004). *Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the Articulation of Sunnī Islam: The Legacy of the Generation of Ibn Saʿd, Ibn Maʿīn, and Ibn Ḥanbal*. Leiden: Brill.

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

Dickinson, E. (2001). *The Development of Early Sunnite Hadith Criticism: The Taqdima of Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī*. Leiden: Brill.

Dickinson, E. (2002). Ibn al-Salah al-Shahrazuri and the Isnad. *Journal of the American Oriental Society*, *122*(3), 481. https://doi.org/10.2307/3087517

Fadel, M. (1995). Ibn Hajar's Hady al-sārī: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukhārī's al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ: Introduction and Translation. *Journal of Near Eastern Studies*, *54*(3), 161–197. https://doi.org/10.1086/373755

Fadila, N. N. (2025). *Kritik Al-Hafidz Al-Iraqī (W. 725-806 H) terhadap hadis dhaif pada kitab Ihyā Ulūmuddīn* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Fatimah, F. (2020). Hadis dari Masa ke Masa (Kodifikasi Era Mutaqaddimin). *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, *4*(1), 57. https://doi.org/10.30983/it.v4i1.2627

Fawwaz Bin Muhammad Yusoff, M. (2020). A Ḥadīth Collection over the Generations: The Transmission of Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. *Islamiyyat*, *42*(2), 15–21. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2020-4202-02

Hasaruddin, H. (2011). Madrasah Pada Masa Islam Klasik: Analisis Historis atas Metode yang Digunakan. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, *8*(1), 121. https://doi.org/10.24239/jsi.v8i1.90.121-138

Hudaya, H. (2018). Metode Syarh Hadis Dalam Kitab Fath Al-Bary. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, *16*(2), 117. https://doi.org/10.18592/jiu.v16i2.1734

Husayn, N. (2022). Modern Muslim Objections to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. *Studia Islamica*, *117*(1), 127–170. https://doi.org/10.1163/19585705-12341459

ibn al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, M. (t.t.). *Sahih Muslim*. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.

Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr, A.-S. (T.t.). *Tadrīb al-Rāwī*. Riyadh: Dār Ṭaybah.

Jamāl al-Dīn 'Abd Allāh ibn Yūsuf, A.-Z. (1995). *Naṣb al-Rāyah fī Takhrīj Aḥādīth al-Hidāyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.

Kamaluddin, A. (2023). Naqd As-Sanad: Metodologi Validasi Hadits Shahih. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, *3*(2), 229–239. https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.136

Makdisi, G. (1981). *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Masood Ahmad & Muhammad Anas. (2025). Comparative Study Of The Methods Of Bukhari And Muslim In Hadith Selection. *Al-Aasar*, *2*(1), 977–992. https://doi.org/10.63878/aaj789

Miftahur Rofi. (2025). Dynamics in Classical Islamic Education: Between Nonformal Autonomy and Madrasah Hegemony (650–1250 CE). *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, *9*(1), 1–24. https://doi.org/10.14421/skijier.2025.91.01

Misbah, M. M. (2020). The Pattern of Science Transmission: A Study on Ibnu Hajar al-Asqalani in Teaching and Writing. *Buletin Al-Turas*, *26*(2), 287–302. https://doi.org/10.15408/bat.v26i2.14989

Mohammed Mubarak Mutahhar, S. (2023). Divine Scriptures: A dogmatic study. *Journal of Arts*, *11*(2), 390–435. https://doi.org/10.35696/.v11i2.1528

M.Taufiq Hidayat, Muhid, & Andris Nurita. (2023). Kodifikasi Hadis Nabi Prespektif Imam Khatib Al-Baghdadi Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(2), 192–207. https://doi.org/10.32665/alulya.v8i2.1642

Muhsin, M. (2013). *Kritik Matan Hadis: Studi Perbandingan antara Manhaj Muhadditsin Mutaqaddimin dan Muta'akhirin* (PhD Dissertation). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nabil Amir, A. (2023). Imam Al-Nawawi: Latar Pemikiran dan Pengaruhnya (Imam al-Nawawi: Historical Context of His Thought and Influence). *Online Journal of Research in Islamic Studies*, *10*(2), 1–16. https://doi.org/10.22452/ris.vol10no2.1

Nur, M. A., Husaein, M., Masrur, A., & Najib, M. (2025). Implikasi Pemikiran Ignaz Goldziher Terhadap Otentisitas Hadis dalam Studi Islam. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, *5*(2), 154–163. https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i2.20720

Oberauer, N. (2022). Canonization in Islamic Law: A Case Study based on Shāfiʿī Literature. *Islamic Law and Society*, *29*(1–2), 123–208. https://doi.org/10.1163/15685195-bja10021

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 396-414
DOI : 10.63424

Pulungan, N. H. (2023). An Orientalist Today: Jonathan A.C. Brown's Thoughts on Hadith. *Ulumuna*, *27*(2), 552–572. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.767

Rippin, A. (2014). The Transmission of the Variant Readings of the Qurān: The Problem of Tawātur and the Emergence of Shawādhdh. *Islam and Christian–Muslim Relations*, *25*(3), 394–397. https://doi.org/10.1080/09596410.2013.871130

Sevtian, M. A. (2024). Metodologi Syarah Hadis Kitab Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim Bin Hajjaj Karya Imam An-Nawawi. *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, *5*(2), 189–204. https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i2.24059

Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad, I. Ḥajar al-'Asqalānī. (1966). *Al-Durar al-Kāminah fī A'yān al-Mi'ah al-Thāminah*. Beirut: Dar al Kutub.

Sumbulah, U., Zarwaki, Z., & Huda, M. M. (2022). Isnad Cum Matan Analysis Sebagai Metode Otentifikasi Hadis Nabi (Analisis Pemikiran Hadis Harald Motzki). *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, *4*(2), 125. https://doi.org/10.24235/jshn.v4i2.12990

W. Brown, D. (1996). *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.

Zubayr Siddiqi, M. (1996). *Hadith Literature: Its Origin, Development & Special Features (Islamic Texts Society*. United Kingdom: Islamic Texts Society.